

# PEMBERDAYAAN LURAH PEREMPUAN DALAM KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Hamida Syari Harahap<sup>1)</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya-Bekasi  
Email : hamidasyari1104@gmail.com

## Abstrak

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial melalui kemajuan yang dilakukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang ditandai dengan kemajuan sosial, kebebasan, keadilan dan kualitas yang dihargai. Untuk mendukung perubahan tersebut maka diperlukan pemimpinyangcakap dan terampil. Dalam melakukan pendekatan program pembangunan agar terjadi perubahan sosial diperlukan kemampuan pemimpin melakukan strategi komunikasi. Untuk melakukan strategi komunikasi pembangunan di wilayah Bekasi maka Walikota Bekasi lebih mempercayakan kepada perempuan. Pemberdayaan perempuan sebagai lurah kota bekasi dianggap bahwa selain perempuan juga memiliki jiwa kepemimpinan juga mampu mengatur masyarakat dan lebih handal dalam melakukan pendekatan dalam program pembangunan sesuai dengan target lurah kota bekasi sampai tahun 2018 semua kelurahan dipimpin oleh perempuan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Perempuan, Komunikasi Pembangunan, Perubahan sosial

## Abstract

*Development is a process of social change through the progress made and provide benefits to the communities that are characterized by social progress, freedom, justice and a esteemed quality. To support these changes then needed an accomplished and skilled leaders. In the approach of development programs in order to make social change happen required the ability of a leader do the communication. To do the communication strategy of development in the area of Bekasi Bekasi Mayor more then entrusted to women. The empowerment of women as head of bekasi city considered that besides the woman also has the soul of leadership is also capable of regulating society and more reliable in conducting approaches in development programs in accordance with the target's history as a city of bekasi until 2018 all wards are led by women.*

**Keywords:** *Women's Empowerment, Development Communication, Social Change*

## PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan baik dalam bidang ekonomi maupun politik harus di dukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan program komunikasi pembangunan. Menurut Effendy (1999:11), komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak

langsung (melalui media). Widjaja dan Hawab (Dilla 2012) mengartikan komunikasi pembangunan sebagai komunikasi yang berisi pesan-pesan pembangunan.

Proses industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak pada perubahan sosial pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Jumlah kaum perempuan yang bekerja di luar rumah semakin meningkat. Hal tersebut juga diikuti oleh fenomena meningkatnya jumlah

perempuan yang menjadi kepala rumah tangga (Biro statistik (2000), "Strategi Kehidupan Perempuan Kepala Rumah Tangga"). Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja memang diharapkan bahkan memang bahkan didorong oleh negara lewat konsep kemitrasejajaran pria dan wanita dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Diharapkan perempuan akan lebih banyak berpartisipasi dalam pembangunan untuk peningkatan pemberdayaan perempuan tidak saja untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang agar tetap berkesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Roro Yoewati, Rabu, 10 September 2014 dalam laman *online tempo.com* mengatakan, "tahun 2018 Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat bakal menempatkan pegawai perempuan di seluruh kelurahan untuk menjabat sebagai lurah. Tapi, untuk merealisasinya dibutuhkan waktu minimal tiga tahun. "Sekarang mulai kaderisasi menjadi lurah".

Lebih lanjut pada 16 Februari 2016 laman *online Beritasatu.com* memberitakan bahwa pemerintahan Kota Bekasi mulai bertekad memposisikan 60% jabatan lurah di wilayah Bekasi dijabat oleh perempuan. Pada laman berita tersebut disebutkan pula bahwa hingga Februari 2015 tercatat 25% atau 15 dari 56 kelurahan dijabat oleh perempuan. Melalui *posbekasi.com*, Senin 12 Februari 2015 Husni Tarigan selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi menyatakan bahwa saat ini lurah perempuan di kota Bekasi berjumlah 15 orang. Pada laman berita tersebut Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi menambahkan bahwa kinerja lurah perempuan lebih rapih dibandingkan lurah pria. Lebih lanjut dikatakan oleh Wali Kota Bekasi bahwa Lurah Perempuan dapat melakukan pendekatan terhadap masyarakat sangat bagus, Oleh karena itu,

dia berharap lurah perempuan bisa lebih baik dalam melayani masyarakat. Ia menambahkan bahwa penunjukan lurah perempuan ini adalah sebuah terobosan baru. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Roro Yoewati juga menambahkan bahwa pemilihan lurah perempuan dengan melakukan pertimbangan, menempatkan perempuan menjabat sebagai lurah karena mempunyai naluri keibuan, sehingga diyakini dapat memberikan contoh kepada masyarakat, mampu menghadapi persoalan yang memicu konflik sosial, pengambilan kebijakan, dan siap bertanggung jawab dengan kebijakan yang dikeluarkan.

Merujuk pada latar belakang diatas dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan dapat ikut serta dalam menyukseskan program-program pembangunan dan menikmati pembagian "kue" pembangunan secara proposional. Hal ini menandakan bahwa tindakan Wali Kota Bekasi sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dengan membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah; (1) untuk mendeskripsikan peran lurah perempuan dalam melaksanakan program pembangunan di Bekasi, (2) untuk menganalisis strategi komunikasi politik lurah perempuan dalam melaksanakan program pembangunan di Kota Bekasi.

## KAJIAN LITERATUR

### **Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan**

Menurut Aminur (2013:4), *Empowerment is a process of positive change that improves women's fallback*

*position and bargaining power within a patriarchal structure, and identify different causal pathways of change; material, cognitive, perceptual and relational.*

*In short, empowerment is a process of awareness and capacity building leading to greater participation, to greater decision-making power and control, and to transformative action. In addition, empowerment is a process that is both individual and collective. Sometimes it involve people as groups that most often begin to develop their awareness and the ability to organize to take action and bring about change.*

Menurut Novian (dalam Maf'idah, (2015:9), pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan proses sekaligus tujuan.

Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat menjadi berdaya.

### **Lurah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 52, Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. (2) Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. (4)

Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam: a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. melakukan pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan pelayanan masyarakat; d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Tugas dan Fungsi Lurah yang dikutip dalam laman media [onlinebekasikota.co.id](http://onlinebekasikota.co.id) (Selasa, 6 Desember 2016), bahwa Kepala Kelurahan pada Daerah Kota Bekasi yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Camat. Tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Memimpin, mengatur, membina dan menkoordinasikan serta mengendalikan tugas kelurahan meliputi sebagian tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Walikota dan Camat serta menyerasikan program dan segenap unsur perangkat Daerah dan atau instansi di wilayah kerjanya dan pemberian pelayanan umum kepada seluruh masyarakat di Kelurahan;
- 2) Menetapkan Visi dan Misi Kelurahan guna mendukung visi dan misi Kecamatan maupun Daerah;
- 3) Menetapkan rencana strategis, rencana kerja serta kegiatan Kelurahan menurut skala prioritas sesuai dengan arah dan Kebijakan Kecamatan maupun Pemerintah Daerah;
- 4) Menyelenggarakan administrasi perkantoran meliputi urusan tata usaha, pembinaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- 5) Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan Kelurahan sesuai lingkup tugasnya;

- 6) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 7) Memberikan pembinaan organisasi dan motivasi kerja kepada bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- 8) Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Seksi Kelurahan;
- 9) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan hubungan kerja intern dan antar Kelurahan serta instansi lainnya di Kelurahan;
- 10) Mengendalikan pengelolaan anggaran rutin Kelurahan;
- 11) Menandatangani naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintah Kelurahan;
- 12) Melaksanakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis prosedur dan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan dan atau penanganan bencana di Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- 13) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi, baik dengan pejabat di lingkungan Kelurahan, maupun Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di Kelurahan;
- 14) Memberikan pembinaan administrasi kependudukan di lingkungan Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW);
- 15) Memantau pelaksanaan pembangunan dalam wilayah kerjanya sesuai bidang tugas dan kewenangan yang diberikan;
- 16) Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunjang pendapatan daerah melalui pembayaran pajak tepat waktu;
- 17) Melaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat atas kejadian bencana maupun ancaman bencana lainnya di Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- 18) Melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitas pelayanan teknis administrasi kependudukan;
- 19) Melaksanakan pendataan, pendaftaran serta penagihan pajak daerah dan retribusi tertentu di bawah koordinasi kecamatan;
- 20) Memantau dan melaporkan dampak pengelolaan pemanfaatan lingkungan hidup oleh usaha industri;
- 21) Membina hubungan kerja sama dengan unsur-unsur masyarakat / lembaga masyarakat terkait dalam setiap kegiatan Kelurahan;
- 22) Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPAT meliputi data pembuatan akta tanah, akta jual beli, akta waris, akta hibah, akta tukar-menukar, akta pemindahan dan pembagian, akta pembagian harta dan warisan di bawah koordinasi Kecamatan;
- 23) Melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 24) Membantu kecamatan melaksanakan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, KB, olahraga, dan kepemudaan;
- 25) Memberikan fasilitas penjenjangan karier bagi staf yang berpotensi;
- 26) Menyampaikan laporan kegiatan dan atau kejadian dampak sosial yang terjadi di kelurahan kepada Camat;
- 27) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- 28) Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kelurahan kepada Camat dengan tembusan kepada Walikota melalui Sekretaris daerah;
- 29) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidangnya.

## **Komunikasi Pembangunan**

Nasution, (1996:128) mengatakan bahwa, “Komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara”. Dikemukakannya pula bahwa komunikasi pembangunan merupakan salah satu terobosan (*break-through*) di lingkungan ilmu-ilmu sosial, dan merupakan inovasi yang harus diusahakan agar diketahui orang dan diterima sebelum ia digunakan..

Tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional dirumuskan dengan baik oleh Schramm (Dilla, 2012) yaitu ; (1) Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan nasional, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional, (2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas, (3) Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang dewasa hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat.

Komunikasi pembangunan yang berhasil mencapai sasaran adalah yang mampu menghindarkan kemungkinan efek-efek yang tidak diinginkan. Kesenjangan efek ditimbulkan oleh kekeliruan cara-cara komunikasi, hal ini bisa diperkecil bila memakai strategi komunikasi pembangunan yang mencakup beberapa prinsip yaitu (Nasution, 2004); (1) penggunaan pesan yang dirancang secara khusus (*tailored*

*message*) untuk khalayak yang spesifik, (2) pendekatan “*ceiling effect*” yaitu dengan mengkomunikasikan pesan-pesan yang bagi golongan yang dituju (katakanlah golongan atas) merupakan reduksi (tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka atau kecil manfaatnya, namun tetap berfaedah bagi golongan khalayak yang hendak dicapai, (3) penggunaan pendekatan “*narrow casting*” atau melokalisir penyampaian pesan bagi kepentingan khalayak, (4) pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbagai bentuk pertunjukkan rakyat yang sejak lama berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat, (5) pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan (*disadvantage*), dan meminta bantuan mereka untuk menolong mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan, (6) mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri, (7) diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme keikutsertaan khalayak (sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri) dalam proses pembangunan, yaitu sejak tahap perencanaan sampai tahap evaluasinya (Nasution 2004).

## **Strategi Komunikasi**

Strategi adalah cara dan atau taktik untuk mencapai tujuan atau “perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan” (tidak hanya peta jalan tapi juga taktik operasionalnya). Adapun komunikasi memiliki arti proses penerusan faktor-faktor, kepercayaan, sikap, reaksi emosi atau lain-lain pengetahuan antar individu dalam masyarakat. Komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran dapat berupa gagasan, informasi, maupun

opini. Adapun perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, maupun keberanian.

Menurut Effendy (1987), Strategi komunikasi adalah paduan antara perencanaan komunikasi (*Communication Planning*) dengan manajemen komunikasi (*Communication Management*) untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) dapat berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi adalah keseluruhan perencanaan, taktik, cara yang akan dipergunakan guna melancarkan komunikasi dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **Perubahan Sosial**

Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat semua unsur budaya dan sistem sosial, dimana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur eksternal meninggalkan pola kehidupan, budaya lama, dan sistem sosial lamanya kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru (Bungin, 2013). Soekanto (2005) juga menjelaskan perubahan sosial dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, dan system sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan polakehidupan, budaya, dan sistem sosial baru.

Proses industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak pada perubahan sosial pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Jumlah kaum perempuan yang bekerja di luar rumah di sektor publik baik di pemerintahan maupun

swasta semakin meningkat. Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja memang diharapkan dan didorong oleh negara lewat konsep ke mitrasejajaran pria dan wanita dalam GBHN. Diharapkan perempuan akan lebih banyak berpartisipasi dalam pembangunan untuk peningkatan pemberdayaan perempuan tidak saja untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang agar tetap berkesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan maka metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan studi pustaka dengan menganalisis secara teoritis mengenai pemberdayaan lurah perempuan dalam komunikasi pembangunan di Kota Bekasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan bacaan yang dibahas melalui buku-buku, jurnal dan bacaan lain yang berhubungan dengan tema artikel ilmiah ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan**

Menurut Aminur (2013:4), *Empowerment is a process of positive change that improves women's fallback position and bargaining power within a patriarchal structure, and identify different causal pathways of change; material, cognitive, perceptual and relational.*

*In short, empowerment is a process of awareness and capacity building leading to greater participation, to greater decision-making power and control, and to transformative action. In addition, empowerment is a process that is both individual and collective. Sometimes it involve people as groups*

*that most often begin to develop their awareness and the ability to organize to take action and bring about change.*

Menurut Novian (dalam Maf'idah, (2015:9), pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan proses sekaligus tujuan.

Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat menjadi berdaya.

### **Lurah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 52, (1) kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, (2) kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah, (3) kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat, (4) lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas membantu camat dalam. Tugas tersebut diantaranya:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Tugas dan Fungsi Lurah yang dikutip dalam laman media [onlinebekasikota.co.id](http://onlinebekasikota.co.id) (Selasa, 6 Desember 2016), bahwa Kepala Kelurahan pada Daerah Kota Bekasi yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Camat. Tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengatur, membina dan menkoordinasikan serta mengendalikan tugas kelurahan meliputi sebagian tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Walikota dan Camat serta menyerasikan program dan segenap unsur perangkat Daerah dan atau instansi di wilayah kerjanya dan pemberian pelayanan umum kepada seluruh masyarakat di Kelurahan;
2. Menetapkan Visi dan Misi Kelurahan guna mendukung visi dan misi Kecamatan maupun Daerah;
3. Menetapkan rencana strategis, rencana kerja serta kegiatan Kelurahan menurut skala prioritas sesuai dengan arah dan Kebijakan Kecamatan maupun Pemerintah Daerah;
4. Menyelenggarakan administrasi perkantoran meliputi urusan tata usaha, pembinaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
5. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan Kelurahan sesuai lingkup tugasnya;
6. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
7. Memberikan pembinaan organisasi dan motivasi kerja kepada bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;

8. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Seksi Kelurahan;
9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan hubungan kerja intern dan antar Kelurahan serta instansi lainnya di Kelurahan;
10. Mengendalikan pengelolaan anggaran rutin Kelurahan;
11. Menandatangani naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintah Kelurahan;
12. Melaksanakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis prosedur dan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan dan atau penanganan bencana di Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
13. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi, baik dengan pejabat di lingkungan Kelurahan, maupun Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di Kelurahan;
14. Memberikan pembinaan administrasi kependudukan di lingkungan Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW);
15. Memantau pelaksanaan pembangunan dalam wilayah kerjanya sesuai bidang tugas dan kewenangan yang diberikan;
16. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunjang pendapatan daerah melalui pembayaran pajak tepat waktu;
17. Melaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat atas kejadian bencana maupun ancaman bencana lainnya di Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
18. Melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitas pelayanan teknis administrasi kependudukan;
19. Melaksanakan pendataan, pendaftaran serta penagihan pajak daerah dan retribusi tertentu di bawah koordinasi kecamatan;
20. Memantau dan melaporkan dampak pengelolaan pemanfaatan lingkungan hidup oleh usaha industri;
21. Membina hubungan kerja sama dengan unsur-unsur masyarakat / lembaga masyarakat terkait dalam setiap kegiatan Kelurahan;
22. Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPAT meliputi data pembuatan akta tanah, akta jual beli, akta waris, akta hibah, akta tukar-menukar, akta pemindahan dan pembagian, akta pembagian harta dan warisan di bawah koordinasi Kecamatan;
23. Melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
24. Membantu kecamatan melaksanakan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, KB, olahraga, dan kepemudaan;
25. Memberikan fasilitas penjurangan karier bagi staf yang berpotensi;
26. Menyampaikan laporan kegiatan dan atau kejadian dampak sosial yang terjadi di kelurahan kepada Camat;
27. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
28. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kelurahan kepada Camat dengan tembusan kepada Walikota melalui Sekretaris daerah;
29. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidangnya.

### **Komunikasi Pembangunan**

Nasution, (1996:128) mengatakan bahwa, "Komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara". Dikemukakannya pula bahwa komunikasi pembangunan merupakan salah satu terobosan (*break-through*) di lingkungan ilmu-ilmu sosial, dan merupakan inovasi yang harus

diusahakan agar diketahui orang dan diterima sebelum ia digunakan..

Tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional dirumuskan dengan baik oleh Schramm (Dilla, 2012) yaitu : 1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan nasional, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional. 2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas. 3. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang dewasa hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat.

Komunikasi pembangunan yang berhasil mencapai sasaran adalah yang mampu menghindarkan kemungkinan efek-efek yang tidak diinginkan. Kesenjangan efek ditimbulkan oleh kekeliruan cara-cara komunikasi, hal ini bisa diperkecil bila memakai strategi komunikasi pembangunan yang mencakup beberapa prinsip yaitu (Nasution, 2004): a. Penggunaan pesan yang dirancang secara khusus (*tailored message*) untuk khalayak yang spesifik. b. Pendekatan "*ceiling effect*" yaitu dengan mengkomunikasikan pesan-pesan yang bagi golongan yang dituju (katakanlah golongan atas) merupakan redudansi (tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka atau kecil manfaatnya, namun tetap berfaedah bagi golongan khalayak yang hendak dicapai. c. Penggunaan pendekatan "*narrow casting*"

atau melokalisir penyampaian pesan bagi kepentingan khalayak. d. Pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbagai bentuk pertunjukkan rakyat yang sejak lama berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat. e. Pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan (*disadvantage*), dan meminta bantuan mereka untuk menolong mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan. f. Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri. g. Diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme keikutsertaan khalayak (sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri) dalam proses pembangunan, yaitu sejak tahap perencanaan sampai tahap evaluasinya (Nasution 2004).

### **Strategi Komunikasi**

Strategi adalah cara dan atau taktik untuk mencapai tujuan atau "perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan" (tidak hanya peta jalan tapi juga taktik operasionalnya). Adapun komunikasi memiliki arti proses penerusan faktor-faktor, kepercayaan, sikap, reaksi emosi atau lain-lain pengetahuan antar individu dalam masyarakat. Komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran dapat berupa gagasan, informasi, maupun opini. Adapun perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, maupun keberanian.

Menurut Effendy (1987), Strategi komunikasi adalah paduan antara perencanaan komunikasi (*Communication Planning*) dengan manajemen komunikasi (*Communication Management*) untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk

mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) dapat berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi adalah keseluruhan perencanaan, taktik, cara yang akan dipergunakan guna melancarkan komunikasi dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **Perubahan Sosial**

Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat semua unsur budaya dan sistem sosial, dimana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur eksternal meninggalkan pola kehidupan, budaya lama, dan sistem sosial lamanya kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru (Bungin, 2013). Soekanto (2005) juga menjelaskan perubahan sosial dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, dan system sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan polakehidupan, budaya, dan sistem sosial baru.

Proses industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak pada perubahan sosial pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Jumlah kaum perempuan yang bekerja di luar rumah di sektor publik baik di pemerintahan maupun swasta semakin meningkat. Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja memang diharapkan dan didorong oleh negara lewat konsep ke mitrasejajaran pria dan wanita dalam GBHN. Diharapkan perempuan akan lebih banyak berpartisipasi dalam pembangunan untuk peningkatan pemberdayaan perempuan tidak saja untuk masa kini tetapi juga untuk masa

yang akan datang agar tetap berkesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan.

### **Pembahasan**

Program pembangunan dalam wilayah pemerintahan kota harus berjalan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan kota. Program pembangunan akan berjalan apabila pesan-pesan pembangunan sampai kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan yakni adanya peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dilingkungan kota Bekasi.

Bekasi merupakan salah satu pemerintahan yang memiliki misi yang memberikan kesempatan dan mendukung perempuan memasuki wilayah sektor publik baik di pemerintahan maupun swasta. Pada lingkup pemerintahan dukungan terhadap perempuan untuk masuk ke sector public sebagai pejabat pemerintah daerah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari target walikota bekasi tahun 2018 sebesar 60% jabatan lurah diduduki perempuan bahkan 100%. Alasan walikota bekasi menargetkan perempuan sampai 100% menduduki jabatan lurah karena perempuan memiliki kemampuan melakukan komunikasi interpersonal, disiplin, bertanggung jawab, mampu menjadi *problem solver*. Walaupun begitu, pemilihan lurah tetap harus sesuai dengan prosedur standar seleksi pemilihan dan minimal memiliki golongan IIC.

Strategi komunikasi merupakan cara yang digunakan untuk melakukan pendekatan program pembangunan. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan interpersonal, komunikasi public dan komunikasi massa. Media yang digunakan media cetak maupun media elektronik.

Kompetensi lurah perempuan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dianggap lebih efektif, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Devito (1997) bahwa komunikasi interpersonal dapat dilakukan dengan keterbukaan

(*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*).

Program pembangunan yang dijalankan oleh lurah perempuan di kelurahan Jakasetia kecamatan Bekasi Selatan yaitu membersihkan saluran air dari sampah, membersihkan lingkungan kerja Kelurahan, membersihkan sampah yang membuat genangan air dan pembuangan sampah, penataan halaman kantor dan pemeliharaan taman. Pemotongan rumput dan kegiatan penghijauan dilakukan dengan perawatan pohon lindung yang ditanam dengan cara menyiram yang dilakukan oleh warga setempat dimana lokasi pohon lindung tersebut ditanam dan menyarankan warga untuk lebih giat menanam pohon.

Dalam menjalankan program pembangunan ini agar terjadi perubahan terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat maka perlu strategi komunikasi dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dengan memberikan model melalui penerapan kerjasama dilingkungan kelurahan untuk melakukan program kerja bakti secara masal oleh para staff dan karyawan sehingga lingkungan kelurahan terlihat bersih dan asri. Selain dengan memberikan model, strategi komunikasi yang digunakan yaitu melibatkan agen perubahan yakni dengan melibatkan penyuluh untuk melakukan penyuluhan pada lingkungan masyarakat sekitar. Lurah Bekasi Jakasetia melakukan kegiatan komunikasi interpersonal sehingga mengetahui permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan warga. Dalam pengawasan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat sekitar Lurah Jakasetia melibatkan warga. Seperti diberitakan dalam laman *on line* megapolitan.com (Selasa, 6 September 2016), "Mariana menyampaikan bahwa peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan sangatlah diperlukan. Menurutnya, peran masyarakat

merupakan kunci sinergitas antara warga dan aparat pemerintah".

"Sidak akan terus kami galakkan, kami juga memerlukan peran warga sekitar untuk ikut peduli setiap ada hal-hal atau kegiatan yang mencurigakan sehingga kita bisa jalin sinergitas dengan aparat pemerintahan yg ada di wilayah".

## KESIMPULAN

Pembangunan menunjukkan apakah suatu Negara atau wilayah mengalami kemajuan atau kemunduran. Sumberdaya manusia yang merupakan salah satu pendukung berjalannya proses pembangunan. Perempuan dianggap mampu turut serta dalam menjalankan proses pembangunan untuk itu dibutuhkan perempuan yang memiliki taraf pendidikan dan kualifikasi yang layak sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan roda pembanguana. Kebijakan Walikota Bekasi Bapak Rahmat Efendi untuk memberdayakan perempuan sebagai Lurah disemua pemerintahan kota bekasi merupakan terobosan untuk memberikan kesempatan perempuan duduk dibangku pemerintahan. Hal ini sesuai denganyang diharapkan dan didorong oleh negara lewat konsep ke mitrasejajaran pria dan wanita dalam GBHN.

Kemampuan Lurah perempuan dalam melakukan pendekatan pada masyarakat dengan sikap keibuan selain didukung kecerdasan intelektual merupakan salah satu strategi komunikasi dalam pembangunan. Agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam memberikan pengetahuan, sikap dan perubahan .perilaku dilingkungan masyarakat, komunikasi interpersonal merupakan salah satu cara yang diterapkan Lurah perempuan Jakasetia di kota Bekasi dalam melakukan pendekatan dan pengawasan terhadap lingkungan yang dipimpinnya. Selain itu memberikan teladanbagi

masyarakat sekitar terkait dengan program yang dijalankan seperti menjaga kebersihan lingkungan kelurahan dengan memberdayakan seluruh pegawai untuk membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah model yang tepat dalam menjalankan strategi komunikasi dalam menjalankan.

## REFERENSI

Aminur Md. (2013). *Global Journal of Human Social Science Sociology and Culture*. Volume 13 Issue 6 Version 1.0 Year 2013 Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal Publisher: Global Journals Inc. (USA) Online ISSN: & Print ISSN: 0975-587X.

Arifin, Anwar. (2006). *Pencitraan Dalam Politik (Strategi Pemenangan Pemilu Dalam Perspektif Komunikasi Politik)*. Jakarta: Pustaka Indonesia.

Bungin, Burhan. (2013). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Grup

Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik konsep teori dan strategi*. Jakarta: Rajawali Pers

Devito JA. (2011). *Komunikasi Antar Manusia*. Tangerang: Karisma Publishing.

Dilla, Sumadi. (2012). *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Effendy OU. (1991). *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

----- (1987). *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University

Mahardika, Timur. (2006). *Strategi Membuka Jalan Perubahan*. Bantul: Pondok Pustaka

Maf'idah. (2015). *Pemerdayaan perempuan melalui program pertanian terpadu*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Nimmo, Dan. (2004). *Komunikasi Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Novian, Budhy. (2010). *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pagkalpinang: Kepulauan Bangka Belitung

Nasution, Zulkarimen. (1996). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi terbaru. Jakarta: Raja Grafindo.

## Sumber Lain

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dserah Pasal 52, <https://m.tempo.co/read/news/2015/02/17/083643107/di-bekasi-25-persen-lurah-dijabat-perempuan> (Senin, 5 Desember 2016) <http://agobekasi.pojokstu.id/2014/09/14/semua-lurah-kota-bekasi-akan-dijabat-kaum-hawa/> (Senin, 5 Desember 2016, pk1 5.05 PM) <http://gobekasi.pojoksatu.id/2014/09/04/pemkot-targetkan-60-persen-jabatan-lurah-bekasi-perem>

puan/(Senin, 5 Desember 2016,  
pkl 5.15PM)

<http://bekasibarat.bekasikota.go.id/read/204/tupoksi-lurah#.WEaWu9V97IU> (Selasa, 6 Desember 2016, pkl 6.14 PM)

<http://www.megapolitan.co/2016/09/06/lurah-jakasetia-sidak-panti-pijat> (Jumat, 13 Januari 2017, pkl 7.35 PM)

<http://www.beritasatu.com/megapolitan/249653-pemkot-bekasi-ingin-lurah-dijabat-kaum-wanita.html> (Minggu, 29 Februari 2017, pkl 10.00 PM)